

**ANALISIS AKUNTANSI PIUTANG GARANSI PADA
PT.TAJELIN SEJAHTERA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

SULIYANTO

NIM : 16622191



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN

TANJUNGPINANG

2020

**ANALISIS AKUNTANSI PIUTANG GARANSI PADA
PT. TAJELIN SEJAHTERA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

SULIYANTO

NIM : 16622191



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG**

2020

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS AKUNTANSI PIUTANG GARANSI PADA
PT. TAJELIN SEJAHTERA TANJUNGPINANG

Diajukan Kepada:

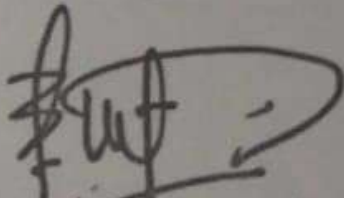
Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh

Nama : Suliyanto
NIM : 16622191

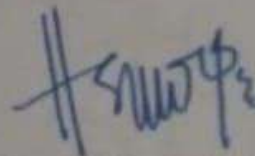
Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN.1029127801 / Lektor

Pembimbing Kedua,



Hasnarika, S.Si, M.Pd
NIDN.1020118901 / Asisten Ahli

Mengetahui,
Pt. Ketua Program Studi,



Hendy Satria, S.E., M.Ak
NIDN.1015069101/Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS AKUNTANSI PIUTANG GARANSI PADA
PT. TAJELIN SEJAHTERA TANJUNGPINANG**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

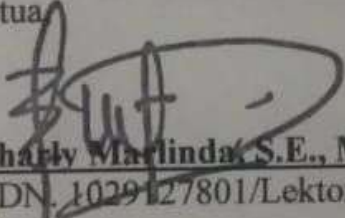
Nama : Suliyanto

NIM : 16622191

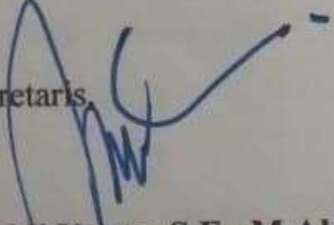
Telah di pertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Delapan Belas Bulan
Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dan Dinyatakan
Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

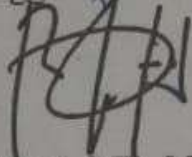
Ketua


(Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA)
NIDN. 1029127801/Lektor

Sekretaris


(Meidi Yanto, S.E., M.Ak)
NIDN. 8804900016/Asisten Ahli

Anggota

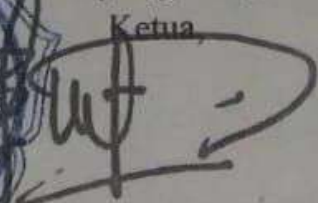

(Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak., CA)
NIDN. 1004117701/Lektor

Tanjungpinang, 18 Agustus 2020

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang



Ketua


Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Suliyanto
NIM : 16622191
Tahun Angkatan : 2016
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,43
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Akuntansi Piutang Garansi Pada PT. Tajelin
Sejahtera Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dalam skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 18 Agustus 2020

Penyusun



Suliyanto
NIM : 16622191

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Lakukan yang terbaik, sehingga aku tak akan menyalahkan diriku sendiri atas segalanya”

(MAGDALENA NEUNER)

“Jangan pernah menunggu. Waktunya tidak akan pernah tepat”

(NAPOLEON HILL)

“yang perlu kita lakukan adalah selalu bersandar ke masa depan, ketika dunia berubah di sekitar Anda dan ketika dunia berubah terhadap Anda – apa yang dulunya angina ekor sekarang adalah angina kepala – Anda harus bersandar pada itu dan mencaritahu apa yang harus dilakukan karena mengeluh bukanlah sebuah strategi”

(JEFF BEZOS)

“Jika kamu tidak menyerah, kamu masih memiliki kesempatan.

Menyerah adalah kegagalan terbesar”

(JACK MA)

“ tidak ada yang tidak mungkin, jikalau jatuh bangun dan perbaiki untuk menjadi

orang yang lebih kuat”

(SULIYANTO)

Dengan penuh rasa syukur saya mempersembahkan karya ini sebagai ungkapan terimakasih kepada kedua orang tua saya ayahanda Apheng dan Ibunda Hartini serta kakak kandung saya yang selalu meberikan semangat dan dukungan kepada saya dalam menyusun karya ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Akuntansi Piutang Garansi Pada PT. Tajelin Sejahtera Tanjungpinang” dibuat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi strata 1 pada program studi Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam proses penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang selalu memberikan dukungan dan bantuan tenaga dan pikiran. Maka dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada pihak – pihak sebagaiberikut :

1. Ibu Charly Marlinda, S.E.,M.Ak.,Ak.,CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang dan sekaligus sebagai pembimbing I (satu) dengan hati yang tulus, sabar dan dapat meluangkan waktunya untuk melakukan bimbingan skripsi ini.
2. Ibu Ranti Urami, S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., Ak.,M.Si.,CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Imran Ilyas, M.M. selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

5. Bapak Hendy Satria, S.E.,M.Ak selaku Plt. Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Hasnarika,S.Si,M.Pd, selaku dosen pembimbing II (kedua) yang telah memberikan saran, nasihat, dan bimbingannya yang sangat besar dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
8. Kedua Orang tua saya yang saya cintai, yaitu Ayahanda Apheng dan Ibu Hartini yang selalu ada untuk saya dalam kesulitan dan kebutuhan saya dalam segala hal dihidup saya dalam bentuk spiritual maupun material
9. Teman – teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, dan
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan selama penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang membangun demi kebaikan penyusunan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua

Tanjungpinang, 18 Agustus 2020

Penulis

Suliyanto
NIM. 16622191

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TANDA PERSETUJUAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Masalah	5
1.5 Kegunaan Penelitian	6
1.5.1 Secara Ilmiah	6
1.5.2 Secara Praktis.....	6
1.6 Sistematis Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Akuntansi	9
2.1.1 Pengertian Akuntansi	9

2.1.2	Sekilas Perkembangan Akuntansi Di Indonesia	10
2.1.3	Tujuan Akuntansi.....	10
2.1.4	Standar Akuntansi Indonesia	17
2.1.5	Pemakai Informasi Akuntansi	20
2.2	Piutang	21
2.2.1	Pengertian Piutang	21
2.2.2	Pengakuan Piutang	21
2.2.3	Penghapusan Piutang	22
2.2.4	Cara Penentuan Besarnya Cadangan Piutang	23
2.2.5	Penurunan Nilai Piutang.....	24
2.2.6	Penilaian Piutang	24
2.2.7	Pendekatan Neraca Untuk Menaksir Kerugian	26
2.2.8	Anjak Piutang	29
2.2.9	Pengendalian Internal Atas Piutang Usaha	27
2.2.10	Menjual Piutang	28
2.3	Garansi	29
2.4	Aset Kontinjensi	32
2.4.1	Pengertian Aset Kontinjensi	32
2.4.2	Pengungkapan Aset Kontinjensi.....	34
2.5	Aset Koninjensi Dalam PSAK	35
2.6	Kewajiban Kontinjensi	35
2.7	Kerangka Pemikiran	42
2.8	Penelitian Terdahulu	44
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	47
3.1	Jenis Penelitian....	47
3.2	Jenis Data.....	47
3.3	Metode Pengumpulan Data	47
3.4	Teknik Analisis Data	48
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
4.1	Hasil Penelitian.....	50
4.1.1	Gambaran Umum	50

4.1.2 Struktur Organisasi	51
4.1.3 Deskripsi Jabatan	53
4.2 Pengakuan Piutang Garansi	56
4.3 Pelaporan Piutang Garansi	64
BAB V PENUTUP.....	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Data Penolakan Garansi Tahun 2019 PT. Tajelin Sejahtera.....	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	42
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	51

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kwitansi Penjualan Unit Motor Bapak Edwinda
- Lampiran 2 Kwitansi Penjualan Unit Motor Bapak Toni Soelestio
- Lampiran 3 Kwitansi Penjualan Unit Motor Ibu lempang Kannatasik
- Lampiran 4 Kwitansi Penjualan Unit Motor Ibu La Hudia
- Lampiran 5 Kwitansi Penjualan Unit Motor Ibu Inah
- Lampiran 6 Kartu Garansi *Service* Ditolak Bapak Edwinda
- Lampiran 7 Kartu Garansi *Service* Ditolak Bapak Toni Soelestio
- Lampiran 8 Kartu Garansi *Service* Ditolak Ibu lempang Kannatasik
- Lampiran 9 Kartu Garansi *Service* Ditolak Ibu La Hudia
- Lampiran 10 Kartu Garansi *Service* Ditolak Ibu Inah
- Lampiran 11 Laporan Neraca Akhir Tahun PT. Tajelin Sejahtera
- Lampiran 12 Hasil Plagiat
- Lampiran 13 Surat Keterangan Izin Penelitian

Abstrak

Analisis Akuntansi Piutang Garansi Pada PT. Tajelin Sejahtera

Kata Kunci : Piutang Garansi, Aset Kontinjensi

Piutang garansi pada dasarnya terjadi karena adanya perjanjian akan pemberian garansi kepada konsumen yang telah melakukan pembelian barang oleh induk perusahaan atau perusahaan yang memproduksi barang tersebut atas barang yang dibeli mengalami kerusakan ataupun juga dapat berupa perawatan berkala atas barang yang dibeli kepada anak perusahaan untuk konsumennya. Dan tentunya garansi tersebut juga terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan klaim garansi tersebut untuk memastikan hak konsumen dapat terpenuhi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencocokkan pengakuan dan pelaporan piutang garansi dengan menggunakan PSAK No. 57 atas klaim garansi oleh konsumen.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menganalisis data, menyajikan data, melakukan penilaian, dan diakhiri dengan kesimpulan.

Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa pencatatan piutang garansi yang dilakukan atas pengakuan dan pelaporan ada yang diakui sebagai aset untuk piutang garansi yang tidak dapat terealisasi yang kemudian dimasukkan kedalam laporan keuangan sebagai aset perusahaan.

Dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan adanya pengakuan dan pelaporan yang belum sesuai dengan PSAK No.57, dimana PT. Tajelin Sejahtera harus mencatat piutang garansi yang terdapat kemungkinan besar tidak dapat direalisasi kedalam aset konsinjensi dan tidak diungkapkan kedalam laporan keuangan.

Skripsi.Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan, 18 Agustus 2020.
(xv + 67 halaman + 2 gambar + 1 tabel + 11 lampiran)

Referensi : 32 Buku (2010-2019 dan 5 Jurnal)
Pembimbing I : Charly Marlinda, SE.M.Ak.Ak.CA.
Pembimbing II : Hasnarika, S.Si, M.Pd

Abstract

Analysis Warranty Receivable In PT. Tajelin Sejahtera Tanjungpinang

Keywords : Warranty Receivable, Contigent Asset

Warranty receivable basically happened because of the agreement of warranty provision for consumers who buy from holding company or company that production the goods on the goods purchased having damaged or can be periodic maintenance coupon for subsidiary company And it must be a conditions that must be considered in doing claim of warranty receivable to make sure consumer rights fulfilled. The purpose of this reasearch is to match the recognition and reporting of warranty receivables with the PSAK number 57 for the claim from the consumer.

Data analysis technique used in this research is descriptive qualitative method that used for collecting data, analyzing data, interpreting data, presenting data, doing assesment, and ended with conclusion.

The result research obtained from this study is reccording of warranty receivables carried out for recognition and reporting some are reognized for assets for warranty receivables that cannot be realized and the entered to financial statement for company assets.

From the result of this study, it can be concluded that recognition and reporting that not accordance with PSAK Number 57, so PT. Tajelin Sejahtera should record the warranty receivables that most likely cannot be realized to contingent assets and not disclosed in financial statement.

**Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan, 18 August 2020.
(xv + 67 pages + 2 images + 1 table + 11 attachments)**

Reference : 32 Books (2010-2019 and 5 Journal)
Preceptor I : Charly Marlinda, SE.M.Ak.Ak.CA.
Preceptor II : Hasnarika, S.Si, M.Pd

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan semakin berkembangnya dunia usaha pada masa kini, tentunya akan semakin banyak juga persaingan perusahaan yang akan dihadapi. Semakin ketatnya persaingan tersebut perusahaan harus melakukan tindakan agar mampu menghadapi persaingannya. Dalam suatu usaha didirikan tentunya dengan tujuan untuk mencari laba yang setinggi mungkin, akan tetap terdapat satu faktor yang juga sangat berpengaruh terhadap hal tersebut adalah tingkat hutang yang dialami perusahaan, jika tingkat hutang perusahaan semakin tinggi maka perusahaan tersebut akan sulit untuk melakukan kegiatan perusahaannya seperti melakukan promosi, potongan harga, hadiah dan lain-lain kepada pelanggannya maka dalam hal ini perusahaan akan menjadi ketinggalan dari kompetitor-kompetitor lainnya yang kondisi keuangannya stabil ataupun baik.

Piutang adalah transaksi yang mengakibatkan kejadian tagih menagih kepada orang yang melakukan utang atau organisasi untuk suatu barang yang telah diberikan kepada konsumen atau pelanggan. Dimana piutang biasanya timbul akibat dari transaksi penjualan barang ataupun jasa yang pembayarannya akan dibayar setelah melakukan transaksi. Disini pihak yang menjual suatu barang berhak melakukan penagihan pada waktu yang telah disepakati bersama pada saat melakukan transaksi jual beli. Pada umumnya jangka waktu piutang yang diberikan oleh penjual dengan tempo 1 bulan sampai dengan 3 bulan.

Secara umum piutang juga terbagi menjadi beberapa kategori dimana mereka adalah Piutang Dagang (*Account Receivable*), Piutang Wesel (*Notes Receivable*), dan Piutang Lain-Lain (*Other Receivable*). Piutang Dagang (*Account Receivable*) adalah piutang yang muncul dari transaksi jual beli pada perusahaan dagang dimana pihak yang menghutang harus membayar secara kredit. Biasanya pada perusahaan dagang jangka waktu yang diberikan oleh perusahaan maksimal jangka waktu satu tahun, karena piutang dagang termasuk dalam harta lancar. Adakalanya piutang dagang tidak dilunasi oleh pengutang dikarenakan pengutang tidak sanggup membayar, terkadang perusahaan juga harus membuat cadangan kerugian piutang yang tidak tertagih agar mengurangi harapan perusahaan akan piutang yang tidak dapat ditagih kembali.

Piutang Wesel (*Notes Receivable*) adalah suatu dokumen yang diterima perusahaan yang akan memiliki hak untuk menerima sejumlah pembayaran dari pengutang. Dalam hal ini pengutang tidak melakukan pembayaran secara tunai melainkan menggunakan surat promes untuk melunasi utangnya. Dan kemudian Piutang Lain-Lain yang merupakan piutang yang tidak hanya terdiri dari satu macam piutang melainkan terdiri dari banyak piutang seperti contoh piutang non usaha, pinjaman yang dilakukan oleh karyawan, dan lain-lain. Pada jenis piutang ini jika pengutang dapat melunasi utangnya dalam jangka waktu satu tahun maka akan dikategorikan kedalam aktiva lancar dan begitu sebaliknya jika pengutang baru sanggup untuk melunasi utangnya pada jangka waktu lebih dari satu tahun maka akan dikategorikan kedalam aktiva tidak lancar.

Setelah memahami tentang Piutang, selanjutnya akan membahas tentang garansi dimana garansi adalah suatu jaminan kepada konsumen atas barang yang dibeli yang mengalami kerusakan atau cacat setelah transaksi pembelian. Salah satu kelebihan dari garansi ini juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen untuk membeli produk yang kita jual karena mereka merasa barang yang mereka beli telah dijamin. Dapat diambil suatu contoh pada dealer sepeda motor, mereka yang memberi garansi atau jaminan kepada konsumennya untuk melakukan *service* motornya untuk merawat motor konsumen agar tidak mengalami kerusakan. Dimana garansi tersebut tentunya memiliki jangka waktu yang telah disepakati bersama pada saat melakukan transaksi jual beli awal.

Pada sisi lainnya garansi juga memiliki sisi kurangnya dimana sering konsumen yang melakukan klaim garansi yang melewati batas kesepakatan garansi, disitu konsumen akan merasa kecewa atas hambatan klaim yang diajukannya dan juga untuk konsumen yang melakukan klaim garansi jika barang tersebut masih mengalami kerusakan maka akan menjadi salah satu hal yang buruk bagi konsumen dan juga perusahaan yang memberi garansi tersebut.

Piutang garansi adalah suatu kewajiban yang pada dasarnya terjadi karena adanya pemberian garansi yang dikeluarkan oleh perusahaan induk atau perusahaan yang memproduksi barang kepada anak perusahaan untuk menjamin barang-barang yang dijual kepada konsumen yang mengalami kerusakan atau cacat sesuai kriteria dan jangka waktu yang telah ditentukan perusahaan yang telah disepakati bersama pada saat melakukan transaksi.

PT. Tajelin Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan sepeda motor Honda (SMH) dan bengkel AHASS dengan mekanik yang ahli, sepeda motor yang dijual terdapat banyak tipe motor yang tersedia untuk konsumen yang berminat dimana diantaranya adalah Vario, Beat, PCX, CB 150 R, CBR 150, CBR 250, Verza, CB 150 Verza, dll. Honda adalah Sepeda Motor yang penjualan dan tingkat produksinya lebih tinggi dibandingkan dengan motor merek lainnya setiap tahunnya. Setiap dealer baik itu Honda, Yamaha, Suzuki ataupun dealer lainnya selalu berusaha untuk bersaing untuk meningkatkan tingkat penjualan mereka, selalu bersaing dalam proses produksi unit, bersaing untuk berlomba unit penjualan setiap saat untuk menghasilkan laba yang maksimal.

Dalam mendirikan suatu dealer resmi tentunya dibutuhkan suatu bengkel dan pada PT. Tajelin Sejahtera memiliki bengkel resmi yang bernama AHASS, dimana AHASS adalah bengkel resmi yang diterapkan oleh PT. Astra Honda Motor dengan mekanik yang telah di latih untuk menjadi mekanik yang berkompeten dan berkualitas. Disinilah bagaimana penulis melakukan penelitian atas klaim utang garansi *service* motor konsumen.

Garansi yang diberikan oleh PT. Tajelin Sejahtera berupa garansi kerusakan mesin dan kupon *service* perawatan berkala (KPB) yang mempunyai empat tahap *service*. KPB tahap pertama memberikan jasa *service* gratis dan penggantian oli mesin gratis dengan jangka waktu garansi dari tanggal pembelian selama 2 bulan atau maksimal kilometer sebesar 1000 Km, dan KPB kedua, ketiga, dan keempat hanya memberikan jasa *service* gratis dan tidak ditanggung olinya tetapi

konsumen diharapkan untuk menganti oli mesinya agar motor tetap terawat. Jangka waktu untuk claim KPB kedua sampai Keempat adalah bulan keempat sampai dengan bulan duabelas atau 4000 Km sampai dengan 12.000 Km. garansi ini terdapat kebijakan yang bukan hanya berasal dari perusahaan yang memberikan akan tetap juga merupakan kebijakan yang berasal dari pusat.

Dalam pencatatan akuntansi terdapat pembatasan dan kriteria yang dimana telah ada dalam PSAK. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang pencatatan Piutang garansi pada PT. Tajelin Sejahtera apakah telah cocok dengan PSAK yang berlaku. Pada dasarnya terdapat konsumen yang melakukan klaim atas garansi yang diberikan pada saat pembelian barang sering terjadinya terlambat. Dalam PSAK No. 57 disebutkan bahwa pengakuan piutang garansi harus disertai dengan kejadian yang sesungguhnya terjadi dan yang memenuhi syarat klaim dan jika tidak memenuhi hal tersebut tidak diungkapkan dalam laporan keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengakuan piutang garansi pada PT. Tajelin Sejahtera Tanjungpinang?
2. Apakah informasi piutang garansi yang diungkapkan dalam laporan posisi keuangan telah memadai pada PT. Tajelin Sejahtera Tanjungpinang?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian piutang garansi ini hanya mencakup kepada garansi *service* motor dengan tipe *Matic* 2019.

1.4 Tujuan Masalah

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Mengetahui pengakuan piutang garansi/aset kontijensi pada PT. Tajelin Sejahtera Tanjungpinang.
2. Mengetahui pengungkapan piutang garansi dalam laporan posisi keuangan pada PT. Tajelin Sejahtera Tanjungpinang.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini penulis diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam hal sebagai berikut :

1.5.1 Secara Ilmiah

Secara ilmiah adapun kegunaan penelitian yang dibuat oleh penulis berharap untuk dapat mampu memberikan ilmu bagi pembaca mengenai utang garansi pada dealer Honda motor kedepannya yang lebih baik.

1.5.2 Secara Praktis

1. Dapat menggambarkan kondisi yang terjadi sebenarnya secara keseluruhan.
2. Meningkatkan pemahaman konsumen agar tidak merasa dirugikan dikarenakan kesalahan dari konsumen.

3. Memberi kepastian pada konsumen bahwa hutang garansi yang diberikan oleh perusahaan bukan seluruhnya merupakan kebijakan dari perusahaan melainkan juga berasal dari pusat perusahaan.

1.6 Sistematis Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang, perumusan masalah, tujuan masalah, batasan masalah, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis mengenai hutang garansi yang akan dibuat oleh peneliti.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis membahas metodologi penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, cara penulis untuk melakukan penelitian, dan jenis data yang diambil.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdapat penguraian berupa deskripsi objek penelitian, menganalisis masalah serta membahas masalah pada objek penelitian, yang dimana disini

peneliti menjelaskan secara deskriptif mengenai permasalahan dan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diajukan kepada pihak yang terkait mengenai hasil penelitian yang telah dibuat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Bahri (2016), akuntansi merupakan suatu seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan terhadap suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, dan berdasarkan standar yang diakui umum. Oleh karena itu, pihak yang berkepentingan atas perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan serta hasil operasi pada setiap waktu yang diperlukan, sehingga dapat mengambil keputusan maupun pemilihan dari berbagai tindakan alternatif di bidang ekonomi. Sedangkan menurut Daud (2017), akuntansi berasal dari bahasa *Account* yang artinya laporan, pencatatan, rekening, harga, nilai, perhitungan.

Menurut Kartomo (2019), akuntansi adalah suatu aktivitas jasa (mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan mengikhtisar) kejadian atau transaksi ekonomi yang menghasilkan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Akuntansi menurut Abubakar & Wibowo (2004) adalah proses identifikasi, pencatatan dan komunikasi terhadap transaksi ekonomi dari suatu entitas atau perusahaan (Kartomo, 2019).

2.1.2 Sekilas Perkembangan Akuntansi di Indonesia

Menurut Mulya (2010), Perkembangan akuntansi di Indonesia terjadi seiring dengan perkembangan dunia bisnis baik dibidang industri jasa, manufaktur maupun perdagangan. Akuntansi sebagai suatu aktivitas jasa, sangat bergantung perkembangannya pada aktivitas ekonomi suatu komunitas. Bisnis di Indonesia dalam perkembangannya mengalami kemajuan-kemajuan yang sangat beragam. Pengaruh perkembangan itu sendiri membawa dampak yang sangat besar terhadap perkembangan akuntansi di Indonesia. Semakin maju dunia bisnis, tentu akan berpengaruh terhadap semakin kompleksnya transaksi yang terjadi baik dari sisi jenis maupun dari sisi jumlah transaksi itu sendiri. Pada akhirnya hal ini akan berpengaruh langsung bagi kemajuan disiplin ilmu akuntansi itu sendiri. Untuk lebih jelasnya bagaimana perkembangan akuntansi di Indonesia.

2.1.3 Tujuan Akuntansi

Menurut Hasanuh (2011), akuntansi mempunyai tujuan utama adalah untuk memberikan informasi ekonomi, antara lain tentang aktiva, hutang, modal, proyeksi laba serta perubahan aktiva dan hutang. Lebih jelasnya adalah bertujuan menghasilkan laporan keuangan.

Menurut Hasanuh (2011), Adapun informasi keuangan yang terkandung dalam laporan keuangan akan bermanfaat bila memenuhi karakteristik informasi yang berkualitas, antara lain :

- Relevan

Relevansi informasi harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Bila informasi tidak relevan untuk maksud keperluan para pengambil keputusan, informasi demikian tidak akan ada gunanya.

- Dapat dimengerti

Informasi harus dapat dimengerti oleh pemakainya dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian para pemakai.

- Daya Uji

Informasi yang dihasilkan harus bisa diuji kebenarannya oleh para pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya. Artinya bahwa informasi yang dihasilkan harus berlandaskan pada realitas objektif dengan adanya bukti.

- Netral

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak tergantung kepada kebutuhan dan keinginan pihak-pihak tertentu.

- Tepat Waktu

Informasi harus disampaikan sedini mungkin supaya digunakan secepat mungkin dalam pengambilan keputusan manajemen.

- Daya Banding

Format dari informasi harus konsisten dan berlaku umum, sehingga bisa dibandingkan, baik dengan informasi dari periode yang lalu maupun dari perusahaan yang sejenis.

- Lengkap

Informasi akuntansi harus lengkap dengan meliputi seluruh data akuntansi keuangan, sehingga penerima informasi bisa memahami secara keseluruhan dan tidak mempunyai pemahaman yang salah atas informasi tersebut.

Menurut Hery (2012), Tujuan akuntansi secara keseluruhan adalah memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Ada banyak pihak yang memberikan pandangan secara berbeda mengenai akuntansi, yaitu akuntansi sebagai suatu ideologi, bahasa, catatan historis, realita ekonomi, sistem informasi, komoditi, pertanggungjawaban, dan teknologi.

- Akuntansi sebagai Suatu Ideologi

Akuntansi dianggap sebagai suatu alat untuk melegitimasi keadaan dan struktur sosial, ekonomi, dan politik kapitalis. Bahkan menurut Karl Marx (Hery, 2012), akuntansi merupakan bentuk kesadaran yang palsu dan merupakan alat untuk memistikkan, bukan memberikan informasi yang benar tentang hubungan sosial yang membentuk lembaga produksi. Ideologi kapitalis telah menyebarkan paham bahwa yang menjadi penggerak produksi adalah pemilik modal, sedangkan menurut Karl Marx (Hery, 2012), adalah bahwa pekerja lah yang seharusnya dianggap sebagai penggerak dan pemilik faktor produksi, yang pada akhirnya memiliki hak untuk menikmati hasil produksi. Akuntansi tidak bebas nilai, dan sering dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi dan mendukung ideologi atau pengusaha organisasi.

Organisasi terbentuk dari sekumpulan manusia. Misi dan tujuan organisasi seharusnya disesuaikan dengan sikap hidup dan filosofi dari manusianya selaku pembentuk organisasi. Jika ideologi seseorang berbeda dengan ideologi yang telah melahirkan akuntansi konvensional (kapitalis), maka konsep akuntansi yang dipakai juga seharusnya berbeda. Pada kenyataannya, konsep akuntansi yang mendominasi praktik saat ini adalah konsep akuntansi yang dilahirkan dari paham kapitalis (ideologi negara barat).

- Akuntansi sebagai Bahasa Bisnis

Akuntansi sering dianggap sebagai bahasa bisnis, yang fungsinya adalah untuk mengomunikasikan informasi mengenai perusahaan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Lewat bahasa akuntansi inilah, *stakeholders* dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi keuangan dan hasil kinerja perusahaan. Sama seperti halnya dengan bahasa, akuntansi juga memiliki simbol-simbol, istilah, kata-kata, yang terkadang hanya dapat dipahami oleh mereka yang mengetahui atau mengerti tentang akuntansi. Contohnya adalah mengenai istilah debit-kredit, akun (perkiraan), jurnal penutup, buku besar, laporan posisi keuangan, jurnal pembalik, dan lain-lain.

Jika bahasa memiliki tata bahasa, maka akuntansi juga memiliki aturan-aturan atau ketentuan yang memungkinkan *stakeholders* memahami pesan yang disampaikan perusahaan. Contohnya adalah ketentuan atau aturan mengenai persamaan dasar akuntansi, saldo normal, proses penyesuaian, mekanisme pembuatan jurnal penutup, pengakuan pendapatan dan beban, pencatatan dan

penilaian persediaan, penghapusan piutang tak tertagih, pengakuan bunga berjalan, dan lain-lain.

- Akuntansi sebagai Catatan Historis

Jika kita berbicara mengenai akuntansi, maka sesungguhnya yang menjadi pusat perhatian dari pelaporan adalah data transaksi keuangan (bisnis) yang telah lewat. Akuntansi dianggap sebagai wahana untuk memberikan gambaran tentang sejarah organisasi dan transaksi yang dilakukannya dengan lingkungannya pada masa yang telah lewat. Catatan ini akan menunjukkan bagaimana manajemen mengelola sumber daya perusahaan. Data historis ini (yang dapat diukur dan dikuantifikasi) akan dicatat dalam jurnal, di-*posting* ke buku besar, dan kemudian menghasilkan laporan keuangan.

- Akuntansi sebagai Realita Ekonomi Saat Ini

Akuntansi dianggap dapat memberikan gambaran mengenai keadaan atau realitas ekonomi perusahaan saat ini. Konsekuensinya adalah bahwa aset dan liabilitas perusahaan harus dicatat dan dilaporkan dengan menggunakan nilai pasar wajar saat ini, bukan biaya historis. Dalam praktik, antara penggunaan biaya historis dan nilai pasar wajar sebagai atribut pengukuran seringkali masih menjadi perdebatan.

Beberapa pihak beranggapan bahwa penggunaan biaya historis sebagai dasar pencatatan dan pelaporan memiliki keunggulan dibandingkan dengan atribut pengukuran lainnya, yaitu lebih dapat diandalkan. Secara umum, pengguna laporan keuangan lebih memilih menggunakan biaya historis karena memberikan tolak ukur yang lebih dapat dipercaya (lebih objektif). Sedangkan

pihak lainnya justru beranggapan bahwa informasi yang disajikan berdasarkan nilai pasar wajar adalah lebih relevan bagi pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan biaya historis. Pengukuran dengan menggunakan nilai wajar, menyediakan gambaran yang lebih baik tentang nilai aset dan liabilitas perusahaan.

- Akuntansi sebagai Sistem Informasi

Akuntansi merupakan teknik menggambarkan proses hubungan antara sumber data keuangan dengan para penerima informasi melalui saluran komunikasi tertentu yang dinamakan siklus akuntansi. Seluruh data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal akan dipindah-bukukan (*di-posting*) ke dalam buku besar sesuai dengan klasifikasi masing-masing akun terkait. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan neraca saldo, menganalisis data penyesuaian, menyiapkan ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, ayat jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan ayat jurnal pembalik. Proses akuntansi yang diawali dengan menganalisis dan menjurnal transaksi, dan yang diakhiri dengan membuat laporan dinamakan sebagai siklus akuntansi (*accounting cycle*). Produk akhir dari siklus akuntansi ini adalah laporan keuangan.

- Akuntansi sebagai Komoditi

Komoditi adalah barang yang dibutuhkan konsumen karena daya gunanya. *Output* akuntansi yang berupa laporan keuangan, yang berisi informasi mengenai posisi keuangan dan hasil kinerja perusahaan, adalah merupakan hasil dari sebuah sistem akuntansi. *Output* ini sangat dibutuhkan oleh para

penggunanya terutama dalam proses pengambilan keputusan ekonomi (baik keputusan investasi, kredit, maupun keputusan serupa lainnya). Komoditi ini akan tetap diproduksi dan dicari apabila dapat memberikan manfaat kepada para penggunanya. Dalam era informasi (globalisasi) ini, profesi akuntansi harus mampu mengatasi risiko atas kemungkinan tidak terpenuhinya kebutuhan *users* akan informasi keuangan. Sudah saatnya bagi profesi akuntansi memulai mengambil tindakan-tindakan yang dapat menjamin utilitas laporan keuangan di masa mendatang.

- Akuntansi sebagai Pertanggungjawaban

Laporan keuangan, sebagai produk akhir dari serangkaian akuntansi, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pihak *principal* (investor, pemilik dana) untuk melaporkan hasil atau kinerja yang telah dilakukan sepanjang periode. Dalam hal ini, manajemen bertindak selaku agen atau pihak yang telah diberi wewenang dan kepercayaan penuh oleh *principal* untuk mengelola aset atau bisnis perusahaan. Dengan adanya laporan pertanggungjawaban ini, maka sumber daya ekonomi yang telah dipercayakan oleh *principal* untuk dikelola manajemen dapat ditelusuri.

- Akuntansi sebagai Teknologi

Teori akuntansi merupakan bagian dari praktik. Agar teori akuntansi bisa dipakai dalam praktik maka diperlukan sebuah teknologi untuk menjembatani antara teori tersebut dengan praktik. Teknologi bisa berdimensi teori dan praktik, dimana memiliki struktur ilmiah yang berlandaskan logika, dan juga berdimensi intuitif atau *judgment* yang berasal dari kenyataan sosial. Jika teori

berguna untuk menjawab pertanyaan “mengapa”, sedangkan teknologi menjawab pertanyaan “bagaimana caranya”. Jadi, akuntansi adalah sebuah teknologi perangkat lunak, yang ditujukan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku variabel-variabel sosial atau ekonomi tertentu. Wujud yang nyata dari akuntansi sebagai perangkat lunak adalah bahwa akuntansi merupakan disiplin ilmu rekayasa informasi dan pengendalian keuangan.

2.1.4 Standar Akuntansi Indonesia

Menurut Daud (2017), standar akuntansi adalah suatu metode dan *format* baku dalam penyajian informasi laporan keuangan suatu kegiatan usaha. Standar akuntansi dibuat, disusun, dan disahkan oleh lembaga resmi (*Standard Setting Body*). Didalam standar ini dijelaskan transaksi apa saja yang harus dicatat, bagaimana cara mencatatnya, dan bagaimana peyajiannya.

Standar akuntansi ini merupakan permasalahan utama akuntan dan semua pengguna laporan yang memiliki kepentingan terhadapnya. Oleh karena itu, metode dan *format* penyusunan standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Standar akuntansi ini akan berubah dan berkembang sesuai dengan tuntutan di masyarakat.

Standar akuntansi di Indonesia saat ini berkembang menjadi 4 (empat) yang dikenal dengan 4 pilar Standar Akuntansi dan ditambah dengan Standar Akuntansi Koperasi sehingga menjadi 5 pilar. Kelima pilar standar akuntansi tersebut disusun dengan mengikuti perkembangan dunia usaha. Lima pilar standar akuntansi tersebut adalah :

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

SAK digunakan untuk suatu badan yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal atau badan fidusia (badan usaha yang menggunakan dana masyarakat, seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun). Sejak tahun 2012, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengadopsi standar dari *International Finance Report Standard (IFRS)* untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku diseluruh perusahaan terdaftar yang ada di Indonesia.

2. Standar Akuntansi Keuangan Badan Usaha tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

SAK-ETAP digunakan untuk suatu badan yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum. SAK-ETAP juga mengikuti standar yang ditetapkan oleh *IFRS* khususnya bidang *Small Medium Enterprise* (Usaha Kecil Menengah). SAK-ETAP ini dikeluarkan sejak tahun 2009 dan berlaku efektif pada tahun 2011.

3. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK-SYARIAH).

Standar ini digunakan untuk badan usaha yang memiliki transaksi syariah atau berbasis syariah. Standar ini terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan istishna.

Bank syariah menggunakan dua standar dalam menyusun laporan keuangan. Sebagai badan usaha yang memiliki akuntabilitas signifikan, bank syariah menggunakan PSAK, sedangkan untuk transaksi syariahnya menggunakan PSAK-Syariah. Akuntansi syariah memang salah satu cabang akuntansi yang tergolong baru. Tidak banyak orang yang mengetahui penerapan prinsip-prinsip syariah ke dalam bidang akuntansi. Sehingga perlu adanya sosialisasi dan pelatihan tentang cabang terbaru bidang akuntansi.

4. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun dengan mengacu kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Standar ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintah baik pusat ataupun daerah.

5. Standar Akuntansi Koperasi Indonesia.

Akuntansi koperasi memang salah satu cabang akuntansi yang tergolong baru. Tidak banyak orang yang mengetahui penerapan prinsip-prinsip koperasi ke dalam bidang akuntansi. Sehingga perlu adanya sosialisasi dan pelatihan tentang cabang terbaru bidang akuntansi ini.

2.1.5 Pemakai Informasi Akuntansi

Menurut Bahri (2016), informasi akuntansi terdiri dari beberapa pihak, yaitu :

1. Investor, penanam modal, penasihat dan pemegang saham membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasinya serta untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar deviden.
2. Karyawan, membutuhkan informasi keuangan mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan, dan untuk menilai kemampuan perusahaan.
3. Pemberi pinjaman, membutuhkan informasi keuangan untuk memutuskan apakah pinjaman dan bunganya dapat dibayar pada jatuh tempo atau tidak.
4. Pemasok atau kreditur usaha lainnya, informasi keuangan digunakan untuk memutuskan apakah jumlah terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.
5. Pelanggan, informasi keuangan digunakan untuk menilai kelangsungan hidup perusahaan.
6. Pemerintah, informasi keuangan dibutuhkan untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional.
7. Masyarakat, informasi keuangan digunakan untuk membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan.

2.2 Piutang

2.2.1 Pengertian Piutang

Menurut Manurung (2011), Piutang adalah jumlah tagihan dari suatu perusahaan terhadap pelanggan berdasarkan kredit yang telah diberikan sebelumnya. Menurut Sulistiyowati (2010b), Piutang adalah hasil dari penjualan barang dan jasa yang dilakukan secara kredit yang akan dibayarkan pada waktu tertentu yang disepakati bersama antara penjual dan pembeli.

Menurut Irma (2017), piutang adalah klaim terhadap pihak lain, klaim tersebut berupa uang, barang ataupun jasa yang meruakan kewajiban pihak lain kepada entitas. Piutang adalah tagihan perusahaan akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang merupakan salah satu dari aktiva lancar yang juga merupakan bagian dari modal kerja perusahaan.

2.2.2 Pengakuan Piutang

Contoh Irma (2017b):

2002

1 Juli PD Mila menjual barang kepada Dian seharga Rp. 100.000,- dengan termin 2/10, N/30

5 Juli Dian Mengembalikan barang tersebut sebesar Rp. 20.000,-

7 Juli Dian membayar kepada PD Mila sebesar saldo tagihanya

Jurnal :

2002

1 Juli	Piutang	Rp. 100.000,-
	Penjualan	Rp. 100.000,-
5 Juli	Retur Penjualan	Rp. 10.000,-

	Piutang	Rp. 10.000,-
7 Juli	Kas	Rp. 88.200,-
	Potongan Penjualan	Rp. 1.800
	Piutang	Rp. 90.000,-

Perhitungan :

Piutang	Rp. 100.000,-
Retur	(Rp. 10.000,-)
Total Piutang	Rp. 90.000,-
Potongan penjualan : 2% x Rp. 90.000,- = Rp. 1.800,-	

2.2.3 Penghapusan Piutang

Menurut Sulistiyowati (2010b), terdapat dua metode untuk suatu piutang yang dipercaya akan tidak tertagih yaitu :

a. Metode penyisihan (*Allowance Method*)

Prinsip akuntansi yang berlaku umum menyarankan penerapan metode ini dalam penyajian laporan keuangan, karena metode ini menyaikan aktiva perusahaan sesuai dengan nilai wajarnya. Tujuan dari metode ini adalah :

- Menyajikan piutang sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang penagihannya dilakukan dengan cara membuat pengurangan nilai piutang sejumlah piutang yang terdapat bukti objektif dimana akan berdampak pada estimasi arus kas masa depan tentang penerimaan pembayaran atas piutang.

- Mengaitkan beban piutang tak tertagih pada periode dimana terdapat bukti objektif bahwa piutang tersebut mengalami penurunan nilai.
- b. Metode penghapusan langsung (*direct write-off Method*)

Dalam metode ini umumnya digunakan untuk pelaporan perpajakan, kecuali ditentukan ditentukan lain oleh Direktorat Jendral Pajak. Pada metode ini perusahaan mengakui biaya penghapusan piutang tak tertagih pada saat terjadinya.

2.2.4 Cara penentuan besarnya cadangan piutang

Menurut Nuraini Fitri (2020), Perkiraan atas suatu cadangan kerugian piutang merupakan perkiraan tandingan atau perkiraan penilai dari perkiraan kontrolnya yaitu piutang dagang. Oleh sebab itu di neraca perkiraan untuk cadangan penghapusan piutang dilaporkan sebagai pengurang dari saldo perkiraan piutang dagang. Dengan begitu piutang dagang pada neraca dilaporkan menurut nilai historis dan nilai wajarnya.

Penggunaan cadangan kerugian piutang harus dilakukan pada setiap akhir periode untuk menentukan besarnya nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Terdapat 2 pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan estimasi yaitu :

1. Pendekatan neraca (*balance sheet statement approach*)

Ada 3 (tiga) tektik untuk estimasi yang dapat digunakan yaitu :

- a. Cadangan kerugian piutang dinaikkan dengan / hingga sebesar persentase tertentu dari saldo piutang.

- b. Cadangan kerugian piutang dinaikkan dengan sebesar persentase tertentu dari saldo piutang.
- c. Cadangan kerugian piutang dinaikkan sampai dengan / hingga sebesar tertentu berdasarkan analisis umur piutang.

2. Pendekatan laba-rugi (*income statement approach*)

Dalam pendekatan ini hanya terdapat 1 (satu) teknik estimasi yaitu cadangan penghapusan piutang dinaikkan dengan sebesar persentase tertentu dari penjualan.

2.2.5 Penurunan Nilai Piutang

Menurut Sodikin (2017), Meskipun telah berhati-hati dalam kebijakan kredit, perusahaan tidak dapat menghindari risiko akan tidak dapat ditagihnya piutang. Penurunan nilai piutang terjadi karena nilai yang tercatat dalam piutang melebihi jumlah piutang yang diperkirakan dapat ditagih. SAK ETAP 2009 mensyaratkan perusahaan untuk menaksirkan penurunan atas nilai piutang tersebut. Penurunan nilai piutang yang diakui sebagai beban.

2.2.6 Penilaian Piutang

Menurut Samryn (2015), Pada prinsipnya, piutang dapat diakui sebesar nilai bruto pengorbanan yang menjadikan timbulnya piutang atau sebesar nilai moneter yang diperjanjikan oleh pihak debitor dan kreditor. Nilai piutang usaha dapat direkam sebesar nilai transaksi penjualan yang tertera dalam faktur. Dalam transaksi piutang yang berasal dari aktivitas memnjamkan uang, nilai bruto piutang dapat direkam sebesar nilai pengeluaran uang dari bukti transaksi tersebut.

Dalam praktiknya, tidak semua piutang dapat direalisasikan menjadi kas. Hal ini juga bisa disebabkan oleh salah menilai calon debitur, kondisi usaha debitur yang menurun, atau karena faktor alam yang diluar kendalam manusia. Untuk menyajikan informasi akuntansi yng realistis, maka perusahaan dapat menghapuskan piutang-piutang yang diyakini, atau bahan yang diragukan kemungkinan untuk dapat ditagih.

Untuk memenuhi standar kualitas informasi yang dsajikan dalam laporan keuangan, maka kualitas piutang juga harus dinilai kembali. Dengan demikian nilai piutang yang disajikan dalam laporan keuangan dapat berbeda dari saldo piutang berdasarkan kesepakatan sebelumnya.

Berkaitan dalam hal ini, maka piutang dalam laporan keuangan dapat disajikan sebesar nilai bersih yang berasal dari saldo nilai bruto setelah dikurangi dengan penghapusan atau penyisihan piutang tak tertagih. Khusus untuk piutang dalam mata uang asing, nilai piutang ini dalam matau uang domestik dapat berubah jumlahnya dari waktu ke waktu karena perubahan nilai tukar mata uang yang digunakan dalam transaksi piutang.

Menurut PAI (Irma, 2017b), piutang harus dilaporkan (di dalam neraca) sebesar nilai kas netto yang bisa direalisasi (jumlah kas bersih yang diperkirakan dapat diterima). Jika ada suatu kemungkinan piutang tidak dilunasi maka harus dibuat Cadangan Kerugian Piutang. Penggunaan dasar waktu (*Accrual Basis*) dalam pencatatan, mangakibatkan adanya pengakuan terhadap penghasilan yang masih akan diterima. Sehingga pada akhir periode dihitung berapa jumlah yang sudah menjadi pendapatan perusahaan dan jumlah tersebut dicatat sebagai Piutang

Penghasilan. Piutang penghasilan akan diterima uangnya dalam jangka relatif pendek, sehingga dimasukkan kedalam kelompok aktiva lancar, contoh : Piutang Pendapatan Bunga, Piutang Pendapatan Sewa, dll.

2.2.7 Pendekatan Neraca Untuk Menaksir Kerugian Piutang

Menurut Sodikin (2017), Terdapat dua dasar dalam menaksir kerugian piutang atau penurunan suatu nilai piutang. Dua dasar tersebut adalah persentase dari penjualan satu periode (pendekatan laba/rugi) dan persentase dari saldo piutang akhir periode (pendekatan neraca/aset-kewajiban). Menurut hemar penulis, SAK ETAP menggunakan pendekatan neraca. Artinya penentuan atas penurunan nilai piutang lebih menekankan pada jumlah piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih.

Saldo akun cadangan diturunkan dari analisis piutang secara individual. Dalam hal tersebut harus menyiapkan sebuah skedul/skedul umur yang menggolongkan pelanggan berdasarkan jangka waktu belum membayar. Oleh karena tekanan waktu, maka analisis ini disebut dengan analisis umur piutang. Sebuah piutang digolongkan berdasarkan umurnya, maka cadangan penurunan nilai piutang ditentukan dengan cara mengalihkan persentase piutang tak tertagih dengan piutang-piutang menurut golongan tersebut. Dimana persentase tersebut ditentukan berdasarkan pengalaman masa lalu.

2.2.8 Anjak Piutang

Menurut Sodikin (2017), Perusahaan dapat mengalihkan piutang usahanya kepada lembaga keuangan untuk memperoleh uang tunai sebelum piutang tersebut jatuh tempo. Jika piutang sudah dialihkan kepada pihak lain, maka giliran pihak

lain yang akan menagihnya yang disebut dengan istilah anjak piutang dan dimana pihak lain yang disebut dengan *factor*. Anjak piutang terbagi menjadi dua yaitu anjak piutang tanpa hak regres (*Without recourse*) dan anjak piutang dengan hak regres (*with recourse*).

Dalam anjak piutang tanpa hak regres, perusahaan mengalihkan piutang kepada *factor* yang menganggapnya sebagai penjualan piutang. Jadi, perusahaan tidak menanggung risiko jika jatuh tempo debitor tidak membayar piutangnya.

2.2.9 Pengendalian Internal atas Piutang Usaha

Menurut Hery (2014), Setiap pengajuan kredit dari calon pelanggan haruslah diuji terlebih dahulu kelayakan kreditnya. Bagian penjualan tidak boleh merangkap bagian kredit. Persetujuan pemberian kredit haruslah dilakukan oleh manajer kredit. Manajer penjualan tidaklah memiliki otorisasi atau wewenang untuk menyetujui proposal kredit pelanggan. Apabila bagian penjualan merangkap bagian kredit, maka dikhawatirkan terutama apabila komisi penjualan ditetapkan berdasarkan pada besarnya penjualan. Seluruh proposal kredit yang diajukan calon pelanggan akan disetujui tanpa adanya evaluasi terlebih dahulu. Dalam hal ini kemungkinan besar risiko akan muncul terutama terhadap calon pelanggan dengan tingkat kredit yang buruk.

Dalam praktek, ketiadaan pemisahan tugas antara fungsi penjualan dengan fungsi kredit, ditambah dengan kurang tepatnya dasar perhitungan komisi, seringkali menimbulkan peluang terjadinya tindakan kecurangan.

Seperti yang kita ketahui, penerapan pengendalian internal tidak terlepas dari biaya-biaya tambahan yang harus dikorbankan perusahaan. Dalam hal ini,

ingat kembali bahwa perusahaan pada dasarnya harus mempertimbangkan atau membandingkan antara besarnya biaya tambahan yang akan dikeluarkan dengan manfaat yang akan diperoleh. Atas dasar pertimbangan *cost* dan *banefit*, jika perusahaan pada akhirnya lebih memilih untuk merangkap kedua fungsi tersebut, maka dasar perhitungan komisi harusah berdasarkan pada tingkat kolektibilitas piutang, dan bukan dari omset penjualan. Artinya komisi penjualan akan dihitung berdasarkan besarnya piutang usaha (yang timbul dari penjualan kredit) yang telah berhasil ditagih atau dikonversi menjadi uang kas.

Akan tetapi, secara normatif, jika berbicara mengenai pemisahan tugas (dalam kaitannya dengan pengendalian internal atas piutang usaha), maka haruslah adanya pemisahan fungsi antara bagian persetujuan kredit, bagian penjualan, bagian pencatatan (akuntansi), dan bagian penagihan. Fungsi persetujuan kredit dan fungsi pembukuan memegang peranan sebagai pengecek keabsahan penjualan. Karyawan yang menangani pencatatan piutang usaha tidak boleh ikut terlibat dalam aktivitas penagihan.

2.2.10 Menjual Piutang

Menurut Samryn (2015), pada prinsipnya penjualan piutang disebabkan dengan adanya keinginan memperoleh sejumlah kas dalam waktu yang segera. Perusahaan yang mengalami kesulitan dalam menagih piutang dari pelanggan misalnya karena mahalnya biaya dan lamanya waktu penagihan kreditor dapat menjual piutangnya kepada pihak yang lain. Pihak pembeli akan membayar sejumlah uang dengan nilai yang lebih kecil kepada penjual piutang. Sebagai kompensasinya pembeli piutang akan melakukan penagihan dengan jumlah yang

lebih besar dari jumlah yang dibayarkan. Cara ini dapat digunakan jika perusahaan menjual piutang yang tidak didukung dengan surat wesel.

Penjualan piutang dapat juga disebabkan oleh karena kesulitan mendapatkan sumber kas dari pihak lain. Misalnya suatu perusahaan membutuhkan kas untuk membiayai pekerjaan tertentu sehingga membutuhkan ekspansi sumber dana. Jika pihak lain tidak bersedia enjamkan dana yang dibutuhkannya, maka sebagai alterntif yang bersangkutan dapat menjual piutangnya kepada pihak lain.

2.3 Garansi

Menurut Shatu (2016), garansi merupakan kewajiban yang timbul sebagai akibat pemberian garansi atas penjualan barang/jasa.

Perlakuan terhadap biaya garansi :

1. Garansi diakui sebagai biaya pada periode penjualan (*expense warranty treatment*)
2. Biaya garansi diakui jika garansi tersebut telah terjadi (*sales warranty treatment*)

Untuk membandingkan pendapatan dan baban dengan layak, besar jaminan produk harus diestimasi dan diakui sebagai beban dalam periode yang sama dari pencatatan pendapatan. Jurnal untuk mencatat estimasi atas beban jaminan produk adalah :

Beban Jaminan Produk	xx
Hutang Jaminan Produk	xx

Sebagai ilustrasi anggaplah bahwa selama bulan Agustus 2008 perusahaan menjual produk sebesar Rp. 100.000.000 dengan memberikan jaminan 36 bulan untuk meeparasi kerusakan yang terjadi atas produk.

Berdasarkan pengalaman masa lalu, beban rata-rata untuk mereparasi produk yang rusak adalah 4% dari harga jual. Maka jurnal untuk mencatat beban jaminan untuk bulan Agustus adalah sebagai berikut :

Beban Jaminan Produk	4.000.000
Hutang Jaminan Produk	4.000.000

Kemudian ayat jurnal untuk mencatat beban reparasi yang dikeluarkan atas produk sebesar Rp. 500.000 pada tanggal 15 September. Apabila pelanggan meminta penggantian atas produk atas produk yang rusak, maka ayat jurnal yang diperlukan adalah sebagai berikut :

Hutang Jaminan Produk	500.000
Persediaan	500.000

Menurut Indonesia (2018), pada saat penjualan, produsen memberikan garansi produk kepada pembeli produknya. Berdasarkan kontrak penjualan, produsen, menjamin akan memperbaiki atau mengganti produk yang dalam jangka waktu tiap tahun sejak tanggal penjualan menampakkan cacat. Berdasarkan pengalaman masa lalu, terdapat kemungkinan besar bahwa akan terjadi klaim atas jaminan yang diberikan.

Contoh :

Pada saat penjualan, suatu produsen memberikan garansi atau jaminan kepada pembeli ketiga lini produknya. Berdasarkan garansi tersebut, produsen

bersedia untuk memperbaiki atau mengganti produk-produknya yang gagal menunjukkan kinerja yang memuaskan selama dua tahun terhitung sejak tanggal penjualan. Pada tanggal pelaporan, diakui provisi sebesar Rp.60 juta. Provisi tersebut tidak didiskontokan (dihitung nilai kininya) karena dampak pendiskontoan tidak material. Entitas mengungkapkan informasi berikut ini :

Entitas mengakui provisi sebesar sebesar Rp.60 juta. Jumlah tersebut adalah jumlah yang diperkirakan akan dikeluarkan entitas bagi klaim atas garansi produk yang dijual selama tiga tahun buku terakhir. Diperkirakan sebagian besar pengeluaran tersebut akan terjadi dalam tahun buku mendatang, dan seluruh pengeluaran akan terjadi dalam dua tahun sejak akhir periode pelaporan.

Menurut Rahman (2010) , produk akan memiliki nilai tambah saat dibeli dengan pelayanan purna jual, sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dan akan mengurangi persepsi risiko pembeli. Garansi menyatakan bahwa sebuah produk bermutu tinggi dan layanan perusahaan tersebut dapat diandalkan. Garansi biasanya dilakukan apabila perusahaan tersebut tidak terkenal tetapi memiliki produk yang unggul dalam persaingannya. Demikian pula dengan jaminan, suatu perusahaan yang memiliki program kepuasan pelanggan akan memberikan kenyamanan sendiri bagi konsumen. Berikut beberapa bentuk jaminan yang umum adalah sebagai berikut :

a. Cash Back Guarantee

Garansi uang kembali bisa Anda berikan jika memang ternyata produk yang diberikan memiliki keurangan atau cacat dan tidak sesuai dengan kualitas yang ditawarkan.

b. *Service Back Guarantee*

Secara denitif sama dengan pengembalian uang, akan tetapi biasanya diberikan pada usaha yang menjual jasa. Misalnya, pelanggan Anda komplain atas pakaian yang ternyata tidak bersih ketika dicuci di *Laundry* Anda, *service back guarantee* adalah pemberian *service* atau pencucian kembali pakaian yang masih kotor tersebut.

c. *48 Hours Guarantee*

Jenis garansi ini biasanya diberikan pada produk konveksi, Anda bisa memberikan garansi hingga dua hari jika produk yang dibeli ternyata ada kerusakan seperti sobek pada bagian yang sebelumnya tidak terlihat oleh pelanggan. Kerusakan tersebut memang terjadi bukan karena kelalaian pelanggan, melainkan dari pabrik/*supplier*.

Anda bisa juga membuat bentuk pelayanan kepuasan konsumen yang berbeda dengan tiga (3) pakem di atas. Dapat disesuaikan dengan bidang usaha dan berimprovisasilah untuk memperoleh kepuasan konsumen.

2.4 Aset Kontinjensi

2.4.1 Pengertian Aset Kontinjensi

Menurut Hans Kartikahadi, Rosita, dkk (2019), Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan.

Aset kontinjensi lazimnya timbul dari peristiwa diluar rencana yang menimbulkan kemungkinan timbulnya arus masuk manfaat ekonomi bagi

perusahaan. Misalnya suatu perusahaan mengajukan suatu gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak paten yang dimilikinya atas pesaing yang melakukan persaingan tidak sehat dengan meniru produk perusahaan.

Aset kontijensi tidak diakui dalam laporan keuangan, agar tidak terjadinya harapan yang berlebihan atas masuknya arus masuk sumber ekonomi yang belum pasti. Tapi apabila terdapat kemungkinan besar arus kas masuk manfaat ekonomi akan diperoleh perusahaan, aset kontinjensi diungkapkan sejasasnya.

Seperti dalam halnya liabilitas kontinjensi, aset kontinjensi juga harus dievaluasi secara berkesinambungan. Penyesuaian harus dilakukan sesuai dengan perkembangan terakhir, apakah telah harus diakui menjadi aset atau tidak perlu lagi diungkapkan karena sudah tidak ada lagi potensi timbulnya aset.

Menurut Indonesia (2018), Aset kontinjensi biasanya timbul dari peristiwa tidak terencana atau tidak diharapkan menimbulkan kemungkinan arus masuk manfaat ekonomik untuk entitas. Sebagai contoh, klaim yang sudah dapat dipastikan, maka aset tersebut bukan merupakan aset kontijensi, melainkan diakui sebagai aset.

Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena dapat menimbulkan pengakuan penghasilan yang mungkin tidak pernah terealisasikan. Akan tetap jika realisasi penghasilan sudah dapat dipastikan, maka aset tersebut bukan merupakan aset kontijensi, melainkan diakui sebagai aset.

Aset kontijensi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomik akan diperoleh entitas. Aset kontinjensi dikaji secara terus-menerus untuk memastikan bahwa perkembangan telah tercermin dengan

semestinya dalam laporan keuangan. Jika dapat dipastikan bahwa entitas akan menerima arus manfaat ekonomik, maka entitas akan mengakui aset dan penghasilan terkait dalam laporan keuangan pada periode timbulnya kepastian tersebut. Akan tetapi, jika timbul hanya kemungkinan besar (bahwa entitas akan memperoleh arus masuk manfaat ekonomik), maka entitas mengungkapkannya sebagai aset kontinjensi.

2.4.4 Pengungkapan Aset Kontinjensi

Menurut Hans Kartikahadi, Rosita, dkk (2019), Bila sesuai persyaratan, dianggap terdapatnya potensi timbulnya suatu aset kontinjensi yang patut diungkapkan, maka pengungkapan harus dilakukan dengan jelas mengenai uraian singkat tentang karakteristik aset kontinjensi; dan apabila praktis :

- a. Estimasi dari dampak finansial yang diukur berdasarkan estimasi terbaik dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian serta nilai kini seandainya nilai waktu adalah signifikan; dan
- b. Indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu penerimaan.

Jika kemungkinan besar terjadi arus masuk manfaat ekonomi, maka entitas mengungkapkan penguraian singkat mengenai suatu karakteristik aset kontinjensi pada akhir periode pelaporan, dan jika praktis, estimasi dampak keuangannya, diukur sesuai dengan prinsip pengukuran yang berlaku bagi provisi.

2.5 Aset Kontinjensi Dalam PSAK

Piutang garansi yang disebut sebagai Aset Kontinjensi terdapat dalam PSAK No. 57 dimana berisi tentang Aset Kontinjensi, Kewajiban Kontinjensi, dan Provisi, dimana didalamnya disebut (Indonesia, 2018), aset kontinjensi merupakan aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Didalam PSAK No. 57 Aset Kontinjensi diatur dalam beberapa hal berikut ini :

1. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena dapat menimbulkan pengakuan penghasilan yang mungkin tidak pernah terealisasi. Akan tetapi, jika realisasi penghasilan sudah dapat dipastikan, maka aset tersebut bukan merupakan aset kontinjensi, melainkan diakui sebagai aset.
2. Aset kontinjensi diungkapkan diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomik akan diperoleh entitas.
3. Aset kontinjensi dikaji secara terus-menerus untuk memastikan bahwa perkembangannya telah tercermin dengan semestinya dalam laporan keuangan. Jika dapat dipastikan bahwa entitas akan menerima arus masuk manfaat ekonomik, maka entitas akan mengakui aset dan penghasilan terkait dalam laporan keuangan pada periode timbulnya kepastian tersebut. Akan tetapi, jika yang timbul hanya kemungkina besar (bahwa entitas akan memperoleh arus masuk manfaat ekonomik), maka entitas mengungkapkannya sebagai aset kontinjensi.

2.6 Kewajiban Kontinjensi

Menurut Hery (2016), suatu transaksi yang terjadi di masa lampau akan menimbulkan kewajiban apabila kejadian tertentu terjadi di masa mendatang. Kewajiban potensial ini dinamakan sebagai kewajiban kontinjensi (*contigent liabilities*), dimana kewajiban belum terjadi pada tanggal neraca. Kewajiban ini baru akan terjadi secara aktual tergantung pada adanya kejadian pada masa yang akan datang.

Banyak perusahaan (penjual) yang setuju untuk memberikan garansi pada pelanggannya atas unit produk yang kurang memuaskan atau untuk mengganti barang yang rusak. Ketika jaminan ini melibatkan biaya di masa yang akan datang, maka estimasi atas biaya garansi seharusnya dibuat dan dibandingkan terhadap pendapatan periode berjalan.

Sebab perusahaan yang menjual mesin pendingin akan memiliki kewajiban kontinjensi untuk estimasi biaya yang akan terjadi sehubungan dengan garansi yang diberikan atas mesin pendingin yang terjual. Transaksi penjualan ini akan menimbulkan kewajiban kontinjensi karena kewajiban tersebut akan sangat tergantung pada kejadian di masa mendatang. Kejadian masa mendatang ini adalah jika ada pembeli yang meminta perbaikan atas mesin pendingin yang dibelinya. Kejadian timbul sebagai hasil dari transaksi yang terjadi di masa lampau, yaitu penjualan mesin pendingin.

Jika kejadian kontinjensi sangat mungkin terjadi (*probable*) dan dapat diestimasi secara layak, maka kewajiban tersebut harus dicatat dalam akun

kewajiban dan disajikan dalam laporan keuangan. Dalam contoh diatas, biaya garansi atas mesin pendingin merupakan kewajiban kontinjensi yang dapat dicatat dan dilaporkan. Biaya garansi tersebut sangat besar kemungkinannya terjadi, karena biaya garansi itu pasti akan terjadi sebesar jumlah tertentu. Besarnya biaya garansi ini dapat diestimasi secara memadai berdasarkan pengalaman perusahaan di masa lampau.

Untuk mengilustrasikan kewajiban garansi, asumsi bahwa perusahaan sepanjang bulan Agustus 2008 telah melakukan penjualan produk senilai Rp. 120.000.000,-. Dalam hal ini, perusahaan memberikan jaminan atas garansi selama satu tahun penuh kepada pembeli atas kemungkinan terjadinya kerusakan produk yang bukan diakibatkan oleh kesalahan pembeli. Berdasarkan pengalaman masa lampau, diketahui bahwa besarnya rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan produk selama masa garansi adalah mecatat (mengakui) estimasi beban garansi atas penjuala produk di bulan Agustus 2008 adalah :

Beban garansi	7.200.000
Uang garansi	7.200.000

(6% x Rp.120 juta)

Berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (untuk tujuan pembukuan atau akuntansi), estimasi atas beban garansi seharusnya dibuat dan dicatat pada saat terjadinya penjualan produk, bukan pada saat terjadinya klaim aktual dari pembeli yang mengajukan klaim perbaikan. Perlakuan akuntansi ini erat kaitannya dengan dasar akrual dan konsep penandingan, yaitu bahwa beban-beban yang dikorbankan dalam rangka menciptakan pendapatan haruslah

dilaporkan dalam periode yang sama sebagaimana pendapatan tersebut dilaporkan, tanpa harus menunggu sampai beban-beban tersebut dibayarkan. Dalam ilustrasi diatas, besarnya estimasi beban garansi untuk produk yang telah terjual selama bulan Agustus haruslah ditandingkan ke pendapatan penjualan bulan Agustus, meskipun klaim aktual mungkin baru akan terjadi di bulan-bulan berikutnya setelah Agustus. Berbeda dengan perlakuan pajak (untuk menghitung laba kena pajak), dimana beban garansi baru boleh diakui sebagai pengurang pendapatan apabila beban garansi tersebut benar-benar secara aktual telah dikeluarkan (*cash basis*).

Pada saat produk yang rusak diperbaiki, biaya perbaikan akan dicatat dalam pembukuan dengan cara mendebet akun utang garansi produk dan mengkreditkan akun kas atau persediaan (suku cadang). Melanjutkan ilustrasi diatas asumsi bahwa pada tanggal 9 September 2008, seorang pembeli (pelanggan) mengajukan klaim kepada perusahaan atas suku cadang yang rusak sebesar Rp. 550.000,-. Ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat klaim aktual tersebut adalah :

Utang garansi	550.000
Suku cadang	550.000

Apabila suatu kewajiban kontinjensi, besar kemungkinannya terjadi, akan tetapi tidak dapat diestimasi secara layak, atau termasuk dalam kategori mungkin terjadi, maka kewajiban kontinjensi tersebut tidak dicatat dalam akun kewajiban, tetapi harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan (*notes to the financial*). Dalam praktek, untuk menentukan antara kewajiban kontinjensi yang kemungkinan besar terjadi (*porable*) dengan kewajiban kontinjensi yang mungkin

terjadi (*possible*), memerlukan suatu pertimbangan profesional tertentu dari pihak manajemen. Contoh kewajiban kontinjensi yang harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan adalah dalam kasus tuntutan pengadilan, dimana besarnya tuntutan biasanya sangat tidak memadai (tidak memungkinkan) untuk dapat diestimasi, sehingga tidak dapat dicatat dalam akun kewajiban.

Sedangkan menurut Sodikin (2017), kewajiban kontinjensi beberapa transaksi yang dibuat dimasa lalu akan menghasilkan kewajiban-kewajiban jika beberapa peristiwa tertentu terjadi di masa mendatang. Menurut Supriyati (2016), kewajiban kontinjensi adalah beberapa transaksi yang dibuat di masa lalu akan menghasilkan kewajiban-kewajiban jika beberapa peristiwa tertentu terjadi di masa mendatang. Sebagai contoh, *Ford Motor Company* akan memiliki kewajiban kontinjensi untuk estimasi biaya yang terkait dengan pekerjaan yang dilindungi garansi pada mobil-mobil yang baru dijual. Kewajiban ini bergantung pada peristiwa di masa depan, misalnya kewajiban ini muncul dari transaksi yang telah lalu, yaitu penjualan kendaraan tersebut. Jika kewajiban kontinjensi kemungkinan akan timbul dan jumlah kewajiban ini dapat diestimasi secara wajar, maka kewajiban harus dicatat.

Menurut Sulistiyowati (2010), kontinjensi adalah kondisi atau situasi dengan hasil akhir berupa keuntungan atau kerugian yang baru dapat dikonfirmasi setelah terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa yang akan datang. Kewajiban kontinjensi tidak diakui sebagai kewajiban di neraca karena kewajiban kontinjensi tersebut merupakan salah satu berikut ini :

1. Kewajiban potensial karena belum pasti apakah perusahaan memiliki aktiva/kewajiban kini yang akan datang menimbulkan arus kas keluar sumber daya; atau
2. Kewajiban kini yang tidak memenuhi kriteria pengakuan karena tidak besar kemungkinan bahwa penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya atau karena estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tidak dapat dibuat.

Kontinjensi juga dapat berupa aktiva kontinjensi, yang merupakan aktiva potensial yang biasanya timbul dari peristiwa tidak terencana atau tidak diharapkan yang menimbulkan kemungkinan arus masuk manfaat ekonomis bagi perusahaan. Aktiva kontinjensi tidak diakui sebagai aktiva di neraca karena dapat menimbulkan pengakuan penghasilan yang mungkin tidak pernah terealisasi. Contohnya bank garansi, garansi-garansi lainnya, kasus hukum yang masih dalam proses pengadilan dan sebagainya.

Menurut Jusuf (2014), Kewajiban Kontinjensi (*Contigent Liabilities*), yaitu kewajiban yang belum tentu terjadi (belum tentu menjadi utang). Ia adalah situasi yang mungkin membuat perusahaan memiliki utang. Bila ternyata di kemudian hari kewajiban ini berubah menjadi nyata. Ia akan “dipindahkan” dari kewajiban kontinjensi menjadi utang dan dicatat di neraca (*on-balance sheet*).

Menurut Anastasia Diana (2017), liabilitas kontinjensi dapat diakui sebagai liabilitas karena :

- a. Belum pasti apakah entitas memiliki kewajiban yang akan menimbulkan arus kas keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi; atau

- b. Tidak memenuhi kriteria pegakuan (karena kecil kemungkinannya bahwa penyelesaian kewajiban akan mengakibatkan arus kas keluar sumber daya dan karena sulit mengestimasi jumlah kewajiban secara memadai dan andal.

Menurut Wibowo (2011), Kewajiban bersyarat (Kewajiban Kontinjensi) terdapat tiga tipe peristiwa bersyarat, yaitu :

1. *Probable contingency*, yang merupakan peristiwa kontinjensi yang tingkat keterjadiannya sangat mungkin, jumlah dapat diestimasi. Jika terjadi peristiwa seperti ini, harus dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
2. *Reasonably possible*, yang merupakan peristiwa kontinjensi yang tingkat keterjadiannya mungkin, tetapi probabilitasnya lebih rendah dibandingkan dengan tipe yang pertama. Jika terjadi peristiwa seperti ini, hanya diperlukan pengungkapan dalam laporan keuangan.
3. *Remote contingency*, yang merupakan peristiwa kontijesi yang kemungkinan keterjadiannya sangat rendah. Jika terjadi peristiwa seperti ini, tidak perlu diucatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.

Menurut Supriyati (2016), entitas mengakui kewajiban diestimasi jika,

1. Entitas memiliki kewajiban kini sebagai hasil dari peristiwa lalu.
2. Kemungkinan terjadi bahwa entitas akan disyaratkan untuk mentransfer manfaat ekonomis pada penyelesaian.
3. Jumlah kewajiban dapat diestimasi.

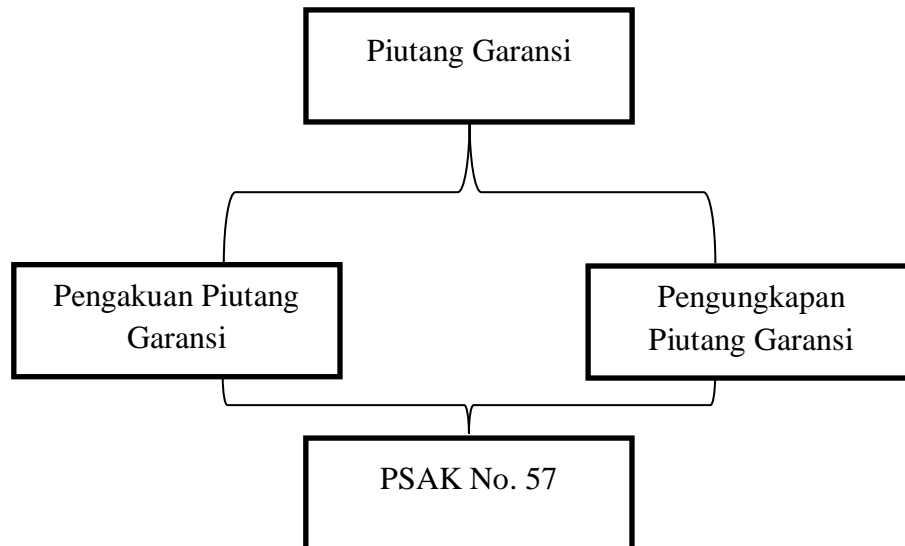
Menurut Indonesia (2018), jika entitas bertanggung jawab secara masing-masing dan bersama dengan pihak lainnya (tanggung renteng) atas suatu kewajiban, maka bagian kewajiban yang diharapkan akan dipenuhi oleh pihak-

pihak lain diperlakukan sebagai liabilitas kontinjensi. Entitas mengakui provisi untuk bagian dari kewajiban yang arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik berkemungkinan besar, kecuali dalam keadaan sangat jarang, ketika estimasi andal dapat dibuat.

Liabilitas dapat berkembang ke arah yang tidak diperkirakan semula. Oleh karena itu, liabilitas kontinjensi terus menerus dikaji ulang untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik bertambah sehingga menjadi kemungkinan besar. Jika timbul kemungkinan besar bahwa arus kas keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik diperlukan untuk menyelesaikan suatu unsur yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai liabilitas kontinjensi, maka entitas mengakui provisi dalam laporan keuangan pada periode saat perubahan menjadi kemungkinan besar tersebut terjadi (kecuali dalam keadaan yang sangat jarang, ketika estimasi andal tidak dapat dibuat).

2.7 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya garansi produk sangat diutamakan dalam jual beli produk elektronik maupu sepeda motor hal ini juga dapat membuat konsumen lebih percaya dan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki jika produknya rusak. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan peneliti terhadap masalah-masalah yang menjadi obyek penelitian itu. Dimana ialah analisis Mengenai Piutang garansi terhadap PSAK dapat digambarkan suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1**Kerangka Pemikiran**

Sumber : konsep yang dikembangkan untuk penelitian (2019)

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian dahulu adalah sumber patokan penelitian terhadap penulis yang dilengkapi dengan berbagai teori yang dapat membantu peneliti dalam menyusun suatu penelitiannya. Berikut merupakan kajian penelitian terdahulu dalam beberapa jurnal yang telah diambil oleh penulis.

1. Cicilia (2016), Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Untuk Menilai Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan. Hasilnya :
 - a. UD. Sinar Jaya menyajikan piutang sebesar nilai bruto piutang dan tidak membuat cadangan kerugian piutang untuk mengurangi resiko piutang tak tertagih pada suatu periode.
 - b. Piutang diakui sampai batas waktu yang tidak bisa diperkirakan.
 - c. Uang muka pembayaran tidak dipersyaratkan dalam transaksi kredit.
2. Christian (2015), Analisis Pengendalian Internal Piutang Usaha Pada *Developer Grand Kawanua International City*. Hasilnya pengendalian internal piutang usaha pada *Developer Grand Kawanua International City* berjalan dengan baik. Perusahaan memiliki SOP yang sangat jelas dan terarah. Selain itu perusahaan juga ditunjang dengan karyawan yang kompeten sehingga tidak pernah terdapat kesalahan yang signifikan pada pencatatan piutang. Selain itu penagihan juga berjalan dengan lancar terbukti dari kecilnya *bad debt* perusahaan.
3. Costa (2015), Analisis Kerugian Piutang Tak Tertagih Pada PT. Metta Karuna Jaya Makassar. Hasilnya PT. Metta Karuna Makassar menetapkan beban kerugian piutang dengan menggunakan metode panghapusan piutang (*direct*

write off method). Penggunaan metode ini menyebabkan beban kerugian piutang akan dicatat berdasarkan piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih. Penghapusan langsung tidak ada cadangan yang dibentuk sebagai pengurang pada nilai piutang usaha di neraca. Penggunaan metode penyisihan (*allowance method*) perusahaan akan membuat suatu estimasi piutang tak tertagih tanpa harus menunggu piutang tersebut benar-benar tak tertagih. Perhitungan menggunakan metode penyisihan dengan skedul umur piutang ini dapat diperoleh nilai realisasi bersih piutang di neraca. Beban kerugian piutang yang dilaporkan dalam laporan laba rugi akan berdasarkan pada estimasi yang dibuat. Metode percadangan ini diharuskan menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, karena metode ini sesuai dengan prinsip perbandingan (*the matching principle*) dan prinsip konservatisme (*the conservatism principle*).

4. Otilia (2013), *Account Receivable Management Practices Of SME's In Tanzania : A Qualitative Approach*. Hasilnya adanya masalah informasi untuk menilai pembeli dan mereka menggunakan cara yang berbeda dalam menyaring calon debitur.
5. Evelin (2012), *Specific Accountinig Policies On Public Institutions Related To Provisions, Contigent Liabilities, And Contigent Assets*. Hasilnya terdapat fakta bahwa ketentuan kewajiban dan aset kontinjensi masing-masing diambil alih dan tidak diambil alih dari peraturan akuntansi nasional pada beberapa masalah akuntansi. Seperti yang dimiliki persyaratan internasional saat ini mensyaratkan legitimasi pelaporan keuangan umum, suatu aspek yang

meminta keharusan untuk memperkenalkan unsur-unsur peraturan akuntansi tentang kewajiban dan aset kontinjensi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Menurut Timotius (2017), Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang ingin mendeskripsikan suatu keadaan tertentu dari suatu kejadian atau populasi tertentu. Menurut Muri (2017), penelitian kualitatif adalah pencarian makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam *setting* yang diteliti dan menyeluruh.

3.2 Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data Sekunder untuk menyusun penelitian. Menurut Nur Achmad Budi Yukiando, Mohammad Maskan (2016), data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Setiap Penelitian terdapat pengumpulan data. Menurut Nur Achmad, Muhammad Maskan (2016), pengumpulan data adalah suatu pengumpulan data dari orang-orang atau objek yang telah ditetapkan sebagai sampel. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah :

1. Dokumen.

Penelitian dengan mengumpulkan data yang ada pada PT. Tajelin Sejahtera dengan Mengambil data-data historis yang telah terjadi seperti jurnal, buku besar, dan laporan keuangan.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode wawancara dengan pihak pembukuan yang menyajikan laporan keuangan pada PT. Tajelin Sejahtera.

3. Observasi

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan pengamatan ke PT. Tajelin Sejahtera dan juga laporan-laporan lainnya yang dibutuhkan oleh peneliti yang telah disajikan oleh pihak pembukuan pada PT. Tajelin Sejahtera.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode teknik analisis yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, dimana teknik ini menerangkan hasil penelitian dengan mencocokkan pencatatan akuntansi pada PT. Tajelin Sejahtera dengan dengan PSAK No. 57.

Menurut Sugiyono (2017), ada tiga teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi Data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *phi chard*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017), kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah ditemukan bahwa masalah dan rumusan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana, L. S. (2017). *Akuntansi keuangan Menengah Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Terbaru* (Yogyakarta). Andi Offset.
- Bahri, S. (2016). *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS* (1st ed.; E. Risanto, ed.). Yogyakarta.
- Christian, R. (2015). *Analisis Pengendalian Internal Piutang Usaha Pada Developer Grand Kawanua International City*. 3, 286–296.
- Cicilia, A. (2016). *Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Untuk Menilai Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan*. 1, 104–120.
- Costa, F. I. Da. (2015). *Analisis Kerugian Piutang Tak Tertagih Pada PT. Metta Karuna Jaya Makassar*. 3.
- Daud, R. (2017). *Akuntansi Dasar Teori&Praktik* (Edisi 1; M. Kika, ed.). Yogyakarta: Andi Offset.
- Evelin, R. (2012). *Account Receivable Management Practices Of SME's In Tanzania : A Qualitative Approach*.
- Hans Kartikahadi, Rosita, D. (2019). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS* (Cetakan Pe; T. E. IAI, ed.). Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Hasanuh, N. (2011). *Akuntansi Dasar Teori dan Praktik* (Edisi Asli). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hery. (2012). *Akuntansi Dan Rahasia Di Balinya Untuk Para Manajer Non-Akuntansi* (F. Hutari, ed.). Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Hery. (2014). *Akuntansi Dasar 1&2* (Gun, ed.). Jakarta: PT. Grasindo.

- Hery. (2016). *Akuntansi Dasar 1&2*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Indonesia, I. A. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan (Edisi 1)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Irma, R. (2017). *Akuntansi Dasar Jilid 2 (Cetakan Pe; F. F. M, ed.)*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Jusuf, J. (2014). *Analisis Kredit Untuk Credit (Account Officer)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kartomo, L. S. (2019). *Buku Ajar Dasar-Dasar Akuntansi (Cetakan Pe; U. P. HAsnanto, ed.)*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Manurung, E. M. (2011). *Akuntansi Dasar (Untuk Pemula) (S. Saat, ed.)*. Jakarta: Erlangga.
- Mulya, D. H. (2010). *Memahami Akuntansi Dasar (Kedua)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Muri, Y. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Cetakan ke; I. Fahmi, ed.)*. Jakarta: Kencana.
- Nur Achmad, Muhammad Maskan, A. U. (2016). *Metodologi Pnelitian Bisnis (Cetakan Pe; F. Nuriansyah, ed.)*. Malang: POLINEMA PRESS, Politeknik Negeri Malang.
- Nur Achmad Budi Yukiando, Mohammad Maskan, A. U. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis (Cetakan Pe; F. Nuriansyah, ed.)*. Malang: Polinema Press, Politeknik Negeri Malang.
- Nuraini Fitri, A. (2020). *Akuntansi Keuangan Menengah 1 (Berdasarkan SAK-ETAP) (Cetakan Pe; T. Q. Media, ed.)*. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara

Media.

Otilia, C. T. (2013). *Specific Accountinig Policies On Public Institutions Related To Provisions, Contigent Liabilities*. (2).

Rahman, A. (2010). *Strateg Dahsyat MARKETING MIX For Small Business* (Cetakan Pe; Hardiansyah, ed.). Jakarta Selatan: TransMedia Pustaka.

Samryn, L. M. (2015). *Pengantar Akuntansi* (Edisi 1). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Shatu, Y. P. (2016). *Kuasai Detail Akuntansi Perkantoran* (N. Sari, ed.). Jakarta: Pustaka Ilmu Semesta.

Sodikin, S. S. (2017). *Akuntansi Pengantar 2 Berbasis SAK ETAP 2009* (Edisi Ketu). Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.

Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Cetakan Ke). Bandung: Alfabeta, CV.

Sulistiyowati, L. (2010a). *Memahami Laporan Keuangan* (Edisi 1). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Sulistiyowati, L. (2010b). *Panduan Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Supriyati. (2016). *Audit Laporan Keuangan Usaha Kecil&menengah Berbasis Akuntansi dan Perpajakan* (Edisi 1). Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Timotius, K. H. (2017). *Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan* (Edisi 1; P. Christian, ed.). Yogyakarta: Andi.

Wibowo, A. (2011). *Akuntansi Keuangan Dasar 2* (Edisi Keti). Jakarta.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURICULUM VITAE)



Nama : Suliyanto
Nim : 16622191
Tempat / Tgl Lahir : Tanjungpinang, 13 Februari 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Buddha
No.Hp : 081275128624
Email : suli75157@gmail.com
Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Tajelin Sejahtera
Alamat : Jl. Sei Jang Perum. Taman Sari No.5
Riwayat Pendidikan : SD Negeri 006 Binaan Tanjungpinang (2010)
SMP Negeri 6 Tanjungpinang (2013)
SMK Pembangunan Tanjungpinang (2016)

Tanjungpinang, 18 Agustus 2020

SULIYANTO
NIM. 16622191